BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik berkembang dengan pesat seiring dengan adanya reformasi di Indonesia dimana kebijakan-kebijakan menitikberatkan kepada pemerintahan daerah. Selain itu, dengan adanya globalisasi juga menuntut setiap pemerintahan untuk berdaya saing begitupun dengan pemerintahan daerah saling berdaya saing untuk menciptakan kemandirian yang diwujudkan karena adanya otonomi daerah (Arfianty & Virlayani, 2017).

Belakangan ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik atau belum, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Di mana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga tercapainya *Good Governance* (Albugis, 2016).

Laporan keuangan daerah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui posisi keuangan suatu organisasi dan mendukung kelangsungan suatu organisasi. Laporan keuangan juga merupakan suatu perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas dari suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang.

Laporan keuangan berkualitas dapat terlihat berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Strata tertinggi hasil opini dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian selanjutnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Selain opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat juga apabila telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, informasi keuangan tidak terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, dan disajikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pujanira & Taman, 2017).

Keuangan daerah yang didefinisikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yakni semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai termasuk kekayaan yang memuat hak dan kewajiban dari daerah tersebut. Selain dari itu, di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 juga mendefinisikan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Khusaini, 2018).

Sistem informasi akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (PP No. 24 tahun 2004) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan (Arfianty & Virlayani, 2017). Kemunculan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) menjadi suatu harapan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga tujuan setiap pemerintah daerah memiliki kemampuan menyusun laporan keuangan daerah yang baik dan juga berkualitas.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan pengelolaan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tarigan, 2013). Dalam pelaksanaan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, kenyataannya mekanisme akuntabilitas keuangan daerah tidak berjalan dengan baik terutama kepada masyarakat. Akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam menciptakan *good governance* terutama dalam memitigasi dampak negatif sosial dan lingkungan (Sanica, Ayu, & Suidarma, 2019).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Purba & Amrul, 2017).

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon merupakan sebuah instansi pemerintah yang mengelola dana pajak daerah dan juga keuangan lainnya di wilayah Kota Cirebon. BPKPD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penyusunan perangkat Daerah Kota Cirebon serta Peraturan Walikota No. 65 tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan keuangan daerah kota cirebon (Fatturohman & Ilyasa, 2020). Peneliti melakukan penelitian di BPKPD karena BPKPD memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat khususnya Kota Cirebon terkait pengelolaan keuangan daerah kota Cirebon dengan harapan data laporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Pengelolaan keuangan daerah masih menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah kota Cirebon adalah dalam hal kapasitas SDM ahli dan profesional yang masih kurang dalam pengoperasionalan sistem akuntansi keuangan daerah. Padahal pada pelaksanaannya Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilakukan pada Senin, 27 Mei 2019 di kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jabar di Bandung (PIKP, 2021). Opini berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 pasal 16 ayat 1 menjelaskan bahwa opini adalah pernyataan profesional tentang kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam data laporan keuangan (Albugis, 2016).

BPKPD Kota Cirebon telah melakukan perbaikan atas penyajian laporan keuangan daerah tetapi belum dapat dilaksanakan secara penuh oleh pemerintah daerah. Upaya reformasi tersebut belum terlihat dapat terlaksana sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Perubahan akuntansi pemerintah daerah dari *single entry* menuju *double entry* merupakan inovasi yang cukup revolusioner. Di sisi lain, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah

melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya masih menjadi hal yang awam bagi sebagian daerah. Begitupun dengan BPKPD Kota Cirebon yang melaporkan laporan keuangannya secara terbuka kepada publik tetapi tidak terbuka secara bebas, masih ada batasan-batasan untuk terciptanya akuntabilitas dan transparansi tersebut karena ini merupakan dokumen rahasia negara yang mana harus ada izin terlebih dahulu dari pihak terkait dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pergantian Permendagri No. 59 Tahun 2007 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual bertujuan supaya pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan asas tertib, ekonomis, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan komprehensif.. Salah satu upaya riil dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan daerah disusun dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang telah diterima secara umum sehingga dapat dikelola berdasarkan standar akuntansi. Ketersediaan sistem akuntansi keuangan daerah yang memiliki nilai akuntabilitas dan transparan diharapkan meningkatkan kualitas laporan keuangan dari setiap pemerintahan daerah khususnya Kota Cirebon. Dan tentunya untuk menciptakan pemerintahan yang *Good Governance* ditentukan berdasarkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut.

Setiap warga negara berhak mengetahui (*right to know*) untuk setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh setiap pejabat negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi maka diharapkan setiap warga negara dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan (Yahya, 2006).

Oleh karena itu penulis meneliti untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah tersebut dengan judul penelitian **" PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon) ".**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya SDM menjadikan proses penyusunan sistem informasi akuntansi keuangan menjadi kurang maksimal.
b. Kualitas laporan keuangan yang kurang baik sehingga berakibat pada laporan keuangan yang tidak akuntabel dan transparan.
c. Kemunculan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) menjadi suatu harapan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga tujuan setiap pemerintah daerah memiliki kemampuan menyusun laporan keuangan daerah yang baik dan juga berkualitas.

2. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membatasi masalah yang diteliti yakni penerapan sistem informasi secara IT atau Teknologi Informasi mengenai akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas , peneliti menyimpulkan pokok permasalahan yang dibuat dalam rumusan masalah berikut ini:

a. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang ada di BPKPD Kota Cirebon?
b. Bagaimana cara mewujudkan keuangan yang transparan dan akuntabel bagi keuangan pemerintah daerah yang ada di BPKPD Kota Cirebon?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang ada di BPKPD Kota Cirebon.
b) Untuk mengetahui cara mewujudkan keuangan yang transparan dan akuntabel bagi keuangan pemerintah daerah yang ada di BPKPD Kota Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian yang sudah disebutkan, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa mengenai bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang ada di BPKPD Kota Cirebon.

b) Bagi peneliti dan pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dan pembaca sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dalam kehidupan mengenai permasalahan yang diteliti.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang ada di BPKPD Kota Cirebon yang mana dalam perwujudan transparansi dan akuntabilitas keuanga pemerintah daerah setempat.

D. Penelitian Terdahulu/*Literature Review*

Dalam penyusunan penelitian ini tentunya penulis telah melakukan penelitian terlebih dahulu dengan membandingkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam topik pembahasan . Dalam hal ini penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan penulis, diantaranya adalah :

1. **Siska Yulia Defitri.** Dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" (Defitri, 2018). Hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang tujuan dari penelitian yakni menguji

kualitas laporan keuangan pemrintah daerah. Adapun perbedaannya adalah terkait teknik pengumpulan data yakni melalui kuesioner sedangkan yang peneliti gunakan adalah dengan wawancara.

2. **Rahima Br. Purba.** Dalam penelitiannya yang berjudul "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar" (Purba, 2018). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah objek yang digunakan Badan Keuangan daerah (sekarang menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah). Adapun perbedaannya yakni metodologi yang digunakan Rahima adalah kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metodologi kualitatif.
3. **Abdul Rahman dan Ayudhini Permatasari.** Dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah" (Rahman & Permatasari, 2021). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlunya peningkatan sumber daya manusia untuk keuangan pengelolaan di daerah dan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah menggunakan metodologi yang sama yakni kualitatif. Adapun perbedaannya adalah fokus pembahasan yang diteliti yakni Abdul membahas kompetensi SDM seangkan peneliti membahas sistem informasi akuntansi keuangan daerah.
4. **Jinnyfer Tumbel, Sifrid Sonny Pangemanan, dan Stanly Alexander.** Dalam penelitiannya yang berjudul "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan di Kabupaten Minahasa Selatan" (Tumbel, Pangemanan, & Alexander, 2019). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah sistem pada Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengambangan di Kabupaten Minahasa Selatan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah variabel yang digunakan mengenai sistem dalam akuntansi keuangan daerah. Adapun perbedaannya adalah objek penelitian yang digunakan yakni Jinnyfer di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sedangan penulis meneliti di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

5. **Zeny Antika, Yunika Murdayanti, dan Hafifah Nasution.** Dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah " (Antika, Murdayanti, & Nasution, 2020). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Persamaan penelitiannya adalah mengenai fokus pembahasannya yakni sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah. Adapun perbedaanya adalah dari metodologi yang digunakan yakni kuantitatif dan kualitatif.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan peneltian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat ditemukan dengan prosedur secara statistik atau pengukuran numerik lainnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menguraikan tentang ucapan, tulisan, perilaku, dan fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat dalam suatu konteks tertentu dan dengan sudut pandang yang menyeluruh (Jaya, 2020).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif didasarkan pada dua alasan. Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data dari lapangan yang bersifat aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan dari fakta alamiahnya.

Tempat penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon yang beralamat di Jl. Pengampon No. 4, Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat 45111.

2. Pendekatan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan secara detail tentang penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon. Oleh karena itu dalam penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus *(case study)* adalah pendekatan penelitian yang mana isinya adalah pendalaman suatu kasus tertentu dengan melibatkan sumber-sumber data atau informasi. Bentuk studi kasus bisa berupa deskriptif, eksplorasi, dan eksplanatori, dari ketiganya disimpulkan bahwa studi kasus ini menangkap arti yang teralam dari suatu kasus atau fenomena yang terjadi.

Studi kasus juga dikenal dengan studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah kasus-kasus atau fenomena yang bersifat kontemporer atau kekinian seperti pembahasan sistem informasi akuntansi keuangan daerah ini. Secara umum studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti. Kasus yang diteliti dapat

berupa satu orang, keluarga, peristiwa, kelompok lain yang cukup terbatas, sehingga peneliti dapat menghayati, memahami, dan mengerti bagaimana objek itu beroperasi atau berfungsi dalam latar alamiah yang sebenarnya (Nurdin & Hartati, 2019).

3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan pda penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data berupa data primer dimana data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan secara langsung dari lapangan atau objek penelitiannya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pihak Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon dan juga observasi ke kantor tersebut untuk melakukan dokumentasi serta melakukan pencatatan secara langsung dari kondisi objek penelitian tersebut. Informan yang digunakan peneliti berjumlah 2 orang, berikut nama-nama informan yang diwawancara: 1) Ibu Susilaningsih, SE. MM selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dan 2) Bapak Pranadi Setyakusumah, S.IP.,MM selaku Sub Koordinator Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Selain menggunakan data primer dalam penyusunan penelitian, peneliti juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian terdahulu berupa literatur-literatur seperti buku, jurnal, tesis, artikel, dan lain-lain. Hal ini bertujuan supaya peneliti dapat melihat konsep dari apa yang akan diteliti dari referensi-referensi yang peneliti kumpulkan. Data sekunder sangat membantu peneliti dalam menyusun penelitiannya dengan membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat untuk mengukur suatu fenomena alam maupun sosial dari objek penelitian yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan obeservasi, wawancara, hingga kajian pustaka untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dibutuhkan Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Handphone
b. Buku Catatan
c. Alat tulis
d. Daftar pertanyaan wawancara
e. Perekam suara
f. Kamera

5. Teknik Pengumpulan Data

Objek penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Penentuan tersebut berdasarkan atas permasalahan yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon. Subjek Penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan peneliti berbentuk semi terstruktur. Pada hal ini pewawancara telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang akan diwawancara tetapi pengajuan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel karena tergantung pada arah pembicaraan (Fadhallah, 2021). Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk menggali informasi mengenai sistem akuntansi keuangan daerah yang ada di BPKPD Kota Cirebon. Adapun informannya yaitu 1) Ibu Susilaningsih, SE. MM selaku

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dan 2) Bapak Pranadi Setyakusumah, S.IP.,MM selaku Sub Koordinator Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung atas fenomena atau kejadian yang sedang diteliti (Kurniawan, 2021). Penulis dalam hal ini melakukan kunjungan penelitian dan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon untuk mendapatkan data yang lebih konkrit.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lainnya pada penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Dokumentasi dipakai untuk melengkapi data-data yang diperlukan dan juga mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti antara lain mencari data dari buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, buletin, makalah, dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut terlihat dengan jelas dan mudah untuk dipahami isinya (Helaluddin & Wijaya, 2019). Peneliti melakukan penelitian lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan dengan data konkrit yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti perlu melakukan analisis sehingga menemukan hipotesis yang mana kemudian itu menjadi hasil penelitian setelah dikembangkan kembali. Adapun tahapan analisis data kualitatif setelah pengumpulan data adalah sebagai berikut: (Sarosa, 2021)

- Reduksi Data, merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah.
- Penyajian Data, merupakan proses menampilkan data yang sudah disederhanakan sebelumnya ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan.
- Verifikasi/Penarikan Kesimpulan, merupakan proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dkumpulkan dan dianalisis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, berikut langkah-langkah dalam pengolahan data tersebut:

a. Penulis melakukan pengumpulan data melalui instrumen pengumpulan data tersebut dan kemudian mengorganisasikan semua data yang telah terkumpul.
b. Penulis membaca kembali data secara keseluruhan dan membuat catatan kecil mengenai data yang dianggap penting.
c. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh respin dengan melakukan horizontaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik pembahasan dan pertanyaan maka akan dihilangkan.
d. Mereduksi data, memilah, memusatkan dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
e. Penyajian data, yakni penulis merangkat dan menyusun informasi dalam bentuk naratif, selektif, dan komunikatif.
f. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul di lapangan. Hasil yang diperoleh kemudian diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini akan menjadi lebih baik jika dengan adanya sistematika yang baik dan benar. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

   BAB I memuat pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. **BAB II LANDASAN TEORI**

   Bab ini membahas tentang teori-teori yang melandasi peneliti dalam menganalisis masalah yang diteliti dalam penelitian ini serta menjadi gambaran peneliti dalam menyusun Bab IV mengenai hasil dan pembahasan penelitian. Kemudian ada kerangka pemikiran.

3. **BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

   Pada BAB ini dipaparkan mengenai gambaran dari objek penelitian yang terdiri dari selayang pandang BPKPD Kota Cirebon, Tugas dan Fungsi BPKPD Kota Cirebon, Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi BPKPD Kota Cirebon.

4. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

   Pada Bab ini dibahas mengenai hasil dari penelitian yang didapatkan oleh peneliti yang kemudian dibahas berdasarkan data yang relevan dengan penelitian tentang Penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.

5. BAB V PENUTUP

BAB ini adalah bab yang terakhir. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukannya. Hasil penelitian diuraikan secara singkat dan padat sesuai dengan hasil penelitian yang diteliti. Kemudian untuk saran berisi tentang hal-hal yang berguna sebagai bahan evaluasi bagi peneliti atau pembaca dari karya ilmiah ini yang mana hal ini untuk keberhasilan penelitian mengenai Penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON